



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 935/V/XI/2016

**Belanda Akui Indonesia  
Negara Demokratis Terbesar Dunia**

**Pelanggaran Hak  
Kemanusiaan di Myanmar  
Perlu Dipertanyakan**

**Komisi VIII DPR RI Dukung NTB  
Jadi Daerah Percontohan  
Sistem Sertifikasi Halal**



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan



Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan PM Belanda Mark Rutte

# Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia

Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

**D**emikian terungkap dalam pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Rutte mengakui sekaligus menghormati Indonesia sebagai negara demokratis terbesar, dalam pertemuan yang dihadiri para anggota DPR RI tersebut. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pula di dunia, Indonesia bisa menjadi kekuatan dunia. Kedua negara bisa saling menguatkan hubungan politik.

Belanda, kata Rutte, tidak anti-Islam. Bahkan, Belanda sangat terbuka dengan para pengungsi muslim dari Timur Tengah yang sedang mencari suaka akibat perang. Yang mungkin belum bisa menerima Islam sepenuhnya di Belanda adalah partai ultra nasionalis. Pemerintah Belanda menyerukan, agar pengungsi dan para pendatang muslim harus menyesuaikan dengan kultur di negara Belanda. Bukan pemerintah Belanda yang harus

menyesuaikan dengan kultur para pendatang.

Di sinilah keragaman dan toleransi bisa tercipta seperti juga di Indonesia yang sangat menghormati keragaman budaya dan agama. Rutte juga memuji Indonesia yang mampu menjaga keragaman masyarakatnya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik penghargaan Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kedua negara bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengelola keragaman masyarakatnya.

"Dalam pertemuan kali ini, kami berbicara tentang penguatan demokrasi, penanggulangan terorisme, hingga kerja sama penanggulangan banjir," jelas Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, di hadapan pers usai pertemuan. Di Indonesia, agama bisa menjadi perekat politik. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, selalu menjadi sumber rujukan untuk menyejahterakan rakyat.

Indonesia, lanjut Akom, bisa juga belajar

dari pengalaman Belanda dalam berdemokrasi. Transfer pengetahuan bisa dilakukan kedua negara. Inilah pertemuan penting yang saling menghargai posisi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Akom juga sempat menjelaskan sejarah berdirinya kompleks parlemen ini yang dahulu digagas oleh mendiang Presiden Soekarno sebagai markas *Conference of The New Emerging Forces* (CONEFO) di tahun 1960-an.

Pemerintah Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah yang tidak mendukung Blok Barat maupun Timur. Dan Indonesia menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non Blok. Gedung Nusantara menjadi proyeksi sekaligus simbol gerakan tersebut. Kini, kompleks parlemen jadi rumah bagi tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Peta politik mutakhir di Tanah Air juga disampaikan Akom dalam pertemuan tersebut. 10 partai politik sudah terwakili di DPR RI hasil Pemilu 2014 lalu. ■

(amb), Foto: Jakarta

## Pelaksanaan Keistimewaan Tidak Boleh Salah UU Lainnya

Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan UU Otonomi Khusus di tiga daerah, yaitu Aceh, Papua dan Yogyakarta melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, (22/11). Kunjungan kerja ini diikuti oleh sembilan anggota DPR RI lintas fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga merupakan Ketua Tim Pemantau.

Anggota Tim Pemantau lainnya yang turut adalah Hanafi Rais (F-PAN), Sirmadji (F-PDIP), Andika Pandu Puragabaya (F-Gerindra), M. Nasir Djamil (F-PKS), Rufinus Hotmaulana (F-Hanura), Muslim Ayub (F-PAN), Rahmat Nasution Hamka (F-PDIP), dan Jamaludin Jaffar (F-PAN).

Fadli Zon menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. "Salah satu tugas DPR RI adalah melakukan pengawasan. Dan kunjungan kerja ke DIY ini adalah dalam rangka mengawasi pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Kami ingin mendalami sejumlah persoalan yang berkembang di Yogya terkait pelaksanaan UU tersebut, terutama untuk soal agraria," papar Fadli.

Fadli menangkap ada kegelisahan di masyarakat sebagai akibat dari berubahnya politik hukum pertanahan sesudah diberlakukannya UU Keistimewaan. Ia menjelaskan hal itu tidak bisa diabaikan. "DPR RI menangkap ada kegelisahan di sejumlah masyarakat Yogya akibat berubahnya politik hukum pertanahan sesudah berlakunya UU Keistimewaan.



Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan UU Otonomi dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon berfoto dengan Gubernur DIY

Persoalan ini tentu saja tidak boleh diabaikan, harus dicarikan penyelesaiannya," kata Fadli.

"Dari pengaduan-pengaduan yang masuk, ada kesan bahwa UU Keistimewaan telah ditafsirkan seolah bersifat *lex specialis* terhadap UU Pokok Agraria, padahal seharusnya tidak. UU Keistimewaan hanya bersifat *lex specialis* terhadap UU Pemerintah Daerah," sambung Fadli.

Fadli menjelaskan proses sinkronisasi harus dilakukan pada level UU. Artinya harus digodok bersama lagi oleh pemerintah pusat dan DPR RI berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, dan bukan disinkronisasi di level Perda. "Proses sinkronisasi itu memang seharusnya terjadi di level undang-undang. Artinya, harus digodok bersama lagi oleh pemerintah pusat dan DPR RI berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak,

dan bukan disinkronisasi di level Perda. Karena kalau sinkronisasi aturannya dilakukan di level Perda, UU Keistimewaan berpotensi akan menjadi *lex specialis* dari berbagai undang-undang."

Ini merupakan kunjungan kerja kedua Tim Pemantau ke Yogya. Kunjungan pertama adalah pada 5-6 Juni 2015. Dari dua kali kunjungan ini, serta diskusi yang dilakukan DPR RI pada 26 Oktober 2015 tentang pertanahan di DIY. Fadli menilai jika sejumlah persoalan yang muncul pasca-berlakunya UU Keistimewaan berasal dari dua hal. Pertama, pemerintah pusat belum melengkapi UU tersebut dengan berbagai peraturan pelaksana, sehingga menimbulkan interpretasi beragam. Dan kedua, UU Keistimewaan masih butuh sinkronisasi dengan UU lainnya, terutama UUPA.

Di Yogyakarta, Tim Pemantau melakukan kunjungan ke Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Sejumlah kasus sengketa agraria, seperti kasus penambangan pasir besi, lahan bandara, serta sejumlah kasus penggusuran, yang kesemuanya terkait dengan klaim tanah Sultan *Ground* (SG) dan Pakualaman *Ground* (PAG), menjadi obyek sorotan tim. Di Kulonprogo, tim ditemui oleh Sekretaris Daerah dan jajarannya, mewakili Bupati yang tidak bisa hadir. Sementara, di Bantul tim disambut oleh Bupati dan jajarannya lengkap. ■

(b). Foto: *hanafis.br*



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.DPR.RI.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]**

## Akom Usulkan Suhardiman Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengusulkan Suhardiman menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Menurutnya, gelar tersebut layak disematkan atas segala jerih payah dan perjuangannya dari semasa muda hingga wafat.

“Bukan hanya perjuangan politik tetapi perjuangan fisik saat menjadi Anggota TNI, beliau sangat layak diperjuangkan menjadi pahlawan nasional,” ungkap Akom, sapaan akrabnya saat berziarah ke makam Suhardiman di kompleks makam keluarga Evergreen, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/11) sore.

Dalam sambutannya, Akom mengatakan Suhardiman adalah salah satu contoh negarawan yang dapat diteladani. Seorang anak bangsa yang berjuang pada zaman penjajahan serta mengabdikan dirinya kepada negara hingga diberikan penghormatan sebagai guru besar.

Pada masa orde lama, Suhardiman turut mewarnai perjalanan politik Indonesia. Ia mendirikan Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) untuk membendung penyebaran paham komunisme serta melakukan perlawanan terhadap G30S PKI.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Selain itu, Akom mengenang Suhardiman sebagai sosok yang juga berkiprah di dunia militer dan terlibat dalam perang merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah.

"Mereka adalah para pejuang yang melawan para penjajah, dan kemudian mengabdikan dirinya di pemerintahan

dan di Tentara Nasional Indonesia. Seperti halnya pahlawan nasional lainnya, beliau juga berhak," ujar politisi F-Partai Golkar itu.

Namun, diakui politisi asal dapil Jawa Barat itu, keputusan pemberian gelar pahlawan diserahkan kepada Dewan Gelar sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan siapapun menjadi pahlawan nasional.

Sebagaimana diketahui, Suhardiman wafat pada usia ke-91. Beliau adalah tokoh politik yang telah melewati 5 masa kepemimpinan Indonesia, mulai dari zaman hindia belanda, zaman jepang, orde lama, orde baru hingga masa reformasi. Semasa hidupnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR/DPR RI dan Dewan Pertimbangan Agung. Kunjungan Akom ke makam Suhardiman masih dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. ■

(ann:rf), Foto: Andri/br

## DPR RI Wacanakan Revisi UU MD3

Dewan Perwakilan Rakyat kembali wacanakan untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (UU MD3). Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, DPR RI menargetkan pembahasan revisi dapat dilakukan pada tahun depan.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Salah satu poinnya adalah mengenai jumlah pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang saat ini sebanyak empat orang atau genap.

"Menyangkut posisi MKD, pimpinannya kan sekarang genap. Sebaiknya pimpinan MKD itu ganjil," kata Akom, usai rapat Badan

Musyawarah yang dihadiri Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Politisi Fraksi-Partai Golkar itu memastikan, poin-poin yang akan direvisi tersebut nantinya diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg).

"(Revisinya) menyangkut beberapa pasal. Tidak banyak, tapi materinya saya belum dapat banyak laporan, sebaiknya tanya Baleg," imbuh Akom.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, ia juga sudah menugaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Badan Keahlian Dewan untuk menggodok regulasi terkait rendahnya tingkat kehadiran Anggota Dewan saat rapat paripurna.

"Akan dirumuskan sebuah regulasi oleh MKD dengan dibantu Badan Keahlian DPR RI. Sudah ditugaskan. Mereka harus rumuskan



Ketua DPR RI Ade Komarudin

regulasinya dulu. Baru kita bawa kembali ke rapat konsultasi pengganti Bamus untuk mengambil keputusan," papar Akom.

Akom memastikan, fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sudah setuju dengan rencana adanya pengetatan sanksi kepada

Anggota dewan yang jarang menghadiri rapat. Akom berharap bila nantinya setelah aturan soal sanksi diterapkan, tidak ada lagi Anggota DPR RI yang mangkir dari rapat paripurna.

"Yang jelas kita ingin ketidakhadiran ini selesai kemudian bisa disepakati bersama dan ditaati bersama. Aturan yang implementatif, yang mampu untuk dilaksanakan," harap Akom. ■

(6) Foto: arif/br

## Dewan Beri Perhatian Khusus untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan usaha kecil yang ada di Indonesia.



Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli

kerja yang kurang progresif, padahal jika usaha kecil dikelola dengan baik, mampu menghadapi kompetisi dengan usaha-usaha bermodal besar.

"Tentang program

Nusantara I. Selain tentang program peningkatan kehidupan usaha kecil, Melani juga mempertanyakan tentang pembentukan hak cipta UKM dan pembentukan kampung UKM digital.

"Pembentukan hak cipta UKM, apakah itu sudah terealisasi hingga 2016 ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan, Kementerian Koperasi berencana membuat Kampung UKM digital di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimanakah ini realisasinya," papar Melani.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana ini juga mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2016. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, realisasi anggaran sampai dengan 15 November 2016 adalah Rp780.435.011.248,- atau sebesar 76,65 persen dari anggaran yang didapat. ■

(6b) Foto: Andri/br

Pasalnya usaha kecil telah berperan sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Usaha ini bersifat padat karya, mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata pertahun masih tinggi.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengevaluasi beberapa program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dia mempertanyakan realisasi program

peningkatan kehidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, itu realisasinya baru sebesar 59,19 persen, sedangkan yang lainnya ada yang sampai 81 persen. Apakah kendala yang menyebabkan realisasinya baru terserap 59,19 persen," ujar Melani mempertanyakan, Rabu (23/11) sore.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI di Ruang Sidang Komisi VI,

## Pelanggaran Hak Kemanusiaan di Myanmar Perlu Dipertanyakan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah melontarkan pernyataan tegas, menanggapi konflik sosial di Rakhine yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Rumah suku Rohingya hancur dan terbakar, sejumlah korban jiwa juga berjatuhan. Politisi dari Fraksi PKS ini menyarankan agar politik luar negeri Indonesia menyatakan sikap bertanya secara lantang tentang kabar pelanggaran hak-hak kemanusiaan di Myanmar.

“Ini perlu penjelasan, dan Indonesia dalam posisi bertanya agak keras, karena bagaimana pun saya mengatakan juga kepada mereka, konsen Indonesia terhadap Myanmar itu tinggi terhadap kasus Rohingya karena faktanya kalangan di umat Islam itu berkembang,” tandas Fahri, di Nusantara III, Selasa (22/11).

Dia menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar meminta penjelasan dari pemerintah Myanmar tentang peristiwa pembantaian umat Islam yang tinggal di negara tersebut, pasalnya kabar yang beredar di sosial media perlu klarifikasi resmi dari Myanmar.

"Kita lihat terutama di sosial media dan di media massa, seberapa betul kejadian itu, karena sekarang orang bisa

menggunakan foto lama untuk kejadian baru dan sebagainya," papar Fahri.

Dia mengatakan, pelanggaran hak-hak kemanusiaan umat Islam yang terjadi di negara tetangga bisa memicu persoalan di Indonesia. "Ini memerlukan kejelasan, jangan dibiarkan opini berkembang tanpa penjelasan resmi dari negara. Saya kira itu yang penting," sergah Fahri.

Fahri menyadari, Indonesia sebagai tetangga yang baik untuk Myanmar harus menjalin diplomasi yang bijak. Jika soal ketimpangan ekonomi menjadi sebab permasalahan maka hendaknya bisa ditangani secara arif.

"Tetangga baik ya kita berkomunikasi yang baik. Kalau memang ada persoalan ketimpangan ekonomi, mudah-mudahan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah

pembangunan ekonomi itu bisa mempercepat proses renkosiliasi. Karena ada kecemburuan soal siapa yang bekerja, siapa yang ekonominya maju dan sebagainya, coba ini diselesaikan," papar Fahri. ■

(foto: Rumi/hr)

## DPR RI Miliki Hak Representasi, Sampaikan Pikiran Rakyat Ke Pemerintah

Dalam konstitusi baru mengatur, kekuatan DPR RI adalah simbol dari lahirnya kedaulatan rakyat, yakni kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Selain hak-hak tradisionalnya yakni membuat UU, membahas anggaran dengan pemerintah, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki hak representasi, yakni hak untuk mendengarkan pemikiran rakyat dan menyampaikannya kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah saat menggelar audiensi dengan Mahasiswa Universitas Presiden, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (22/11).

“Tidak ada lagi sumbatan, itulah sebabnya kalau DPR RI bekerja dengan sangat baik, maka tidak perlu lagi demonstrasi di luar. Sebab DPR RI bisa diperankan untuk melakukan teguran kepada pemerintah secara langsung,” ucapnya.

Menurutnya, sekarang ini masih ada gejala atau isu kontemporer ditingkat pemerintahan. Yakni dengan adanya inisiatif dari eksekutif yang ingin mengajak semua partai politik dalam pemerintahan agar bersikap

sama dan satu suara. Hal ini akan mengakibatkan elemen-elemen yang bersikap kritis menjadi hilang, karena seolah-olah begitu diberikan jatah posisi satu atau dua Menteri dalam kabinet, maka semua yang lain harus bersikap diam.

"Dalam sistem



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah berfoto bersama dengan para Mahasiswa Presiden University

presidential, Presiden yang membuat pemerintahan, tetapi rakyat juga memilih wakilnya di DPR RI yang diberi kewenangan penuh untuk mengkritik Presidennya. Meskipun Presiden tersebut berasal dari partainya sendiri, karena para wakil rakyat itu bukan dipilih oleh Presiden, melainkan oleh rakyat. Kalau DPR RI

direnggut sikap kritisnya, maka parlemen jalanan yang akan hidup. Tetapi bila DPR RI dibiarkan bersikap kritis, maka parlemen jalanan akan hilang," tandasnya. ■

(dep), Foto: Ranti/br

## Pemilihan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR RI Momen Perbaiki Lembaga Parlemen

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta momentum pemilihan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR RI untuk bersama-sama memperbaiki lembaga perwakilan kita ini.

“ Kalau ada yang bopeng dibedakan ada yang kurang halus dihalusin," pesannya saat



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Sekjen DPR RI dan Kepala BKD berfoto bersama Wartawan Koordinatoriat DPR RI

memberikan sambutan sekaligus membuka acara *Press Gathering* di Wisma Kopo, Bogor Jumat (18/11) malam.

Bahkan Akom sapaan akrab Ketua DPR RI ini menyatakan dirinya terbuka untuk dikritik. Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto ini mengaku mempunyai kepentingan agar di bawah kepemimpinannya Dewan menjadi lebih baik. Bersama empat pimpinan lain dari jajaran Setjen juga mempunyai kepentingan yang sama. Namun lanjutnya, ternyata perbaikan tidak mudah perlu kesabaran, stamina dan pemikiran yang jernih.

"Untungnya saya tidak ada kepentingan pribadi untuk menjadi anggota DPR RI lagi, saya plong," ungkap politisi Golkar yang sudah jadi legislator sejak tahun 1997 ini. Akom menyatakan dirinya hanya mau selama menjabat Ketua DPR RI bisa lebih lagi dan penggantinya nanti juga lebih baik.

"Saya berusaha terbuka dengan kejernihan hati mengusahakan bagaimana institusi yang saya cintai sejak 1997 hingga sekarang ini baik dan dipercaya masyarakat," papar dia. Dengan latar belakang orang pers di awal jabatannya sebagai Ketua DPR RI telah mengusahakan *Press Room* yang layak dan sekarang sudah oke. Hadir dalam acara ini Sekjen DPR RI, Kepala BKD, Deputi dan pejabat Setjen DPR RI lainnya. ■

(dep), foto: nufanarif/br

## Agus Hermanto Dorong Pemanfaatan Panas Bumi

Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar, potensi alamnya dapat menghasilkan hampir 30 Giga Watt, akan tetapi potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 5 persen dari total potensi yang ada atau sekitar 1500 Mega Watt.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto mendorong agar potensi panas bumi yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt yang direncanakan pemerintah. Dia berharap agar semua langkah positif ini dapat didukung semua pihak sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan-tantangan kebutuhan energi secara bersama.

"Potensi yang besar tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program prioritas pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt yang telah dicanangkan oleh pemerintah," tandas Agus saat *Coffee Morning*, di Ruang Lounge Nusantara III, Rabu (23/11).

Pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan panas bumi juga mendukung *Paris Agreement* pada *The 21<sup>st</sup> Conference of the Parties (COP 21)* di Paris. Isinya tentang kesepakatan negara-negara untuk menahan laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi karbon, maka tren energi dunia kini beralih menuju energi masa depan yang rendah karbon yaitu energi terbarukan.

"Hasil dari kesepakatan tersebut yang dikenal dengan *Paris Agreement* telah diratifikasi melalui Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu, 19 Oktober 2016," kata Agus.

Kebutuhan negara akan energi makin meningkat setiap tahun. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batubara dalam memenuhi kebutuhannya. DPR RI melihat sudah saatnya Indonesia dapat memaksimalkan pengembangan potensi energi non fosil untuk mengimbangi kebutuhan energi saat ini. ■

(abo), Foto: Arief/br

# Ketua DPR RI dan Dubes Inggris Bahas UU Terorisme

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Dalam pertemuan itu, dibahas beberapa tema, salah satunya mengenai Undang-undang Terorisme.

**H**adir juga dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto (F-PD) dan Fahri Hamzah (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifulah Tamliha (F-PPP), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (F-PG), dan Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno (F-PG).

"Satu agenda yang utama yaitu tentang UU terorisme. Kami ingin belajar dari Kerajaan Inggris melalui Duta Besar Moazzam Malik, tentang bagaimana Inggris menghadapi terorisme," kata Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, usai pertemuan.

Akom menyoroti UU Terorisme di Inggris yang sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. "Undang-undangnya sering mengalami perubahan sesuai dengan tantangan karena teknologi semakin maju, termasuk teknologi yang digunakan teroris," imbuh Akom.

Politisi F-PG itu memastikan, pihaknya akan segera membahas RUU Terorisme dan menargetkan dapat menyelesaikannya pada tahun mendatang.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas mengenai hubungan bilateral kedua negara. Akom memastikan, dengan adanya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Indonesia dengan Inggris, dapat memaksimalkan kerjasama yang sudah terjalin.

"Kami mendukung Pemerintah dalam kerjasama bilateral dengan Inggris. Kami berharap, kerjasama investasi berjalan dengan baik," harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Akom juga menekankan, kerjasama dalam pendidikan juga dapat ditingkatkan. Mengingat banyak pelajar Tanah Air yang belajar atau mendapat beasiswa di Inggris. Ia pun berharap, jumlah beasiswa untuk pelajar Indonesia dapat ditambah jumlahnya.

Sementara itu, Agus menekankan kerjasama dalam hal transfer teknologi untuk teknologi panas bumi. Pasalnya, ia

menilai Inggris maju dalam hal permesinan. "Kita ingin membuat teknologinya di sini, dengan transfer teknologi dari Inggris," imbuh Agus.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu juga berharap pertukaran pelajar yang selama ini sudah terjalin, dapat ditingkatkan.

Menanggapi hal itu, Malik menekankan

negaranya juga berkomitmen dalam meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Khusus untuk masalah UU Terorisme, pihaknya juga siap untuk bertukar pendapat.

"Kita perlu kerjasama dalam menanggulangi terorisme dan ekstrimis. Kami juga melihat, banyak hal yang bisa dipelajari dari Indonesia dalam menanggulangi terorisme," kata Malik.

Dubes yang baru pertama kali berkunjung secara resmi ke DPR RI itu juga menambahkan, pihaknya selalu memperbarui UU Terorisme, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi.

"Kami siap bekerjasama dengan DPR RI dalam mendukung kinerja legislasi. Kami mempunyai lembaga yang dapat berbagi pengalaman mengenai legislasi," kata Malik.

Malik menilai, Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi motor perekonomian Asia, bahkan dunia. Untuk itu, negaranya akan meningkatkan investasi di Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan Inggris sangat berminat untuk



*Pimpinan DPR RI didampingi sejumlah Anggota DPR RI berfoto bersama Dubes Kerajaan Inggris*

berinvestasi di Indonesia.

Kami harap, 1 juta lapangan pekerjaan di Indonesia, berasal dari perusahaan Inggris. Kami berharap ke depannya, hubungan kerjasama semakin meningkat," kata Malik, yang cukup fasih berbahasa Indonesia.

Terkait pendidikan, ia mendorong agar universitas-universitas di Inggris bekerjasama dengan universitas di Indonesia melalui pertukaran pelajar, sehingga peringkat universitas Indonesia juga meningkat. Pasalnya, saat ini belum ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk top 500 dunia. ■

*(6/1) Foto: Anand/br*

## Sekjen DPR RI Harapkan Wartawan Kompak Bersama-sama Perkuat DPR RI

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengemukakan, dalam penyusunan kepengurusan wartawan koordinatioriat DPR RI pihaknya tidak pernah ikut-ikutan atau intervensi. Itu adalah urusan "dalam negeri" atau internal para awak pers.

## Komisi II Desak Kemendagri Selesaikan Permasalahan E-KTP

Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan E-KTP yang kini cukup menyita perhatian masyarakat.

**H**al itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rabu, (23/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Komisi II dapat menerima penjelasan Kemendagri terkait penyelesaian pelaksanaan E-KTP serta meminta untuk menyelesaikan

permasalahan pengadaan blangko, data kependudukan dan permasalahan teknis perekam KTP elektronik," ujar Rambe saat membacakan kesimpulan rapat.

Politisi Golkar ini juga meminta Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk memberi kepastian bagi pemilih pemula pada hari pelaksanaan Pilkada serentak.

"Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk memberi kepastian bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2017 untuk dilakukan perekaman

sebelumnya dan mendapat surat keterangan pengganti KTP Elektronik dari Disdukcapil Kabupaten atau Kota," papar Rambe.

Terkait pendanaan dan transportasi bagi petugas perekaman KTP elektronik di kecamatan, Komisi II juga meminta Kemendagri untuk memberikan dukungan. Hal itu dimaksudkan agar petugas dapat bekerja secara maksimal, "Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk mendukung pendanaan dan transportasi bagi petugas perekaman KTP elektronik di tingkat kecamatan, sehingga dapat bekerja maksimal dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Selain itu, Komisi II juga meminta agar hal lain diluar agenda acara seperti fungsi dan uji petik KTP elektronik, struktur organisasi dan tata kerja agar mendapatkan perhatian dari Kemendagri. ■



Ketua Komisi II DPR RI dan Mendagri

“ Ketika menyampaikan sambutan dalam acara *press gathering* di Kopo, Bogor, Jumat (18/11) malam, Win panggilan akrab Sekjen DPR RI menjelaskan bahwa kepentingan DPR RI terhadap para wartawan hendaknya kompak. Silahkan memilih pengurus sesuai mekanisme yang disepakati. "Kepentingan kami, para wartawan bisa kompak dan tertib untuk bersama-sama memperkuat DPR RI," tegasnya.

Menurutnya, dalam acara *press gathering* yang bertema "Membangun Spirit Kebersamaan Pimpinan, Sekjen dan Wartawan Koordinatoriat DPR RI" ini ada kekhususan yakni berakhirnya kepengurusan periode 2014-2016 dan memilih pengurus masa bakti 2016-2018.

Sesuai harapan Pimpinan, lanjut Win, pihaknya juga sudah merenovasi media center yang cukup nyaman dan representatif.

Selain itu, ruangnya ber AC dan ada ruangan khusus untuk perokok. " Kami saksikan kebersihan media center sudah terjaga. Dengan ruangan yang enak maka teman-teman pers akan menulis dan menyajikan berita yang enak dan menarik juga," ia menambahkan. Selama tahun 2016 ini, *press gathering* sudah digelar sebanyak empat kali, pertama di Bogor, kemudian di Batam, ketiga kalinya di Bali dan yang terakhir di penghujung 2016 diselenggarakan di Kopo, Bogor bersamaan dengan pemilihan pengurus baru. ■



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

## Baleg Bentuk Panja Prolegnas 2017

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk panitia kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2017. Panja inilah yang nantinya akan mensortir Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017.

“ Pembahasan akan dilakukan lebih mendalam terkait dalam penyusunan prolegnas prioritas Tahun 2017, akan dilakukan pada tingkat panja,” ungkap Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dalam Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, pembentukan panja sebagai upaya DPR RI bersama pemerintah untuk mengefektifkan kinerja dalam legislasi. Keduanya bersepakat untuk menetapkan minimal 40 RUU dan maksimal 45 RUU prioritas pada tahun 2017.

Adapun RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017 akan diatur berdasarkan parameter yang ada. Disebutkannya, dari RUU yang dalam pembicaraan tingkat I DPR RI, RUU yang sudah selesai maupun dalam tahap harmonisasi dan penyusunan, jika memenuhi kriteria urgensi maka akan tetap dilanjutkan dalam RUU Prioritas 2017.

Saat ini, DPR RI telah

mengesahkan pembahasan 17 RUU (8 RUU K u m u l a t i f terbuka) dari total 50 RUU dalam P r o l e g n a s Prioritas 2016. Sementara, 19 RUU dalam p e m b a h a s a n tingkat I, 3 RUU s e l e s a i harmonisasi, empat RUU dalam tahap harmonisasi dan 15 RUU masih dalam tahap penyusunan.

"Mengingat capaian legislasi tersebut, tentunya kinerja pada tahun 2016 belum memuaskan dan hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2017 yang akan datang," harap Firman selaku Ketua Panja Prolegnas Prioritas 2017.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo jabat tangan dengan Menkumham

yang terpenting adalah konsistensi DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan RUU.

"Seandainya dari RUU ada yang geraknya tidak maju, kita juga harus berani untuk *dropnya* dan diganti ke RUU yang mendesak dan sudah siap sehingga kritik-kritik yang sering disampaikan ke pemerintah maupun DPR RI terkait rendahnya kinerja legislasi bisa ditepis," kata Yasonna. ■

(anu.mp/jacchrenabr)

## Komisi X dan Pemerintah Bahas Strategi Pembahasan RUU Kebudayaan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) akan ditargetkan selesai pada Maret 2017. Untuk itu, dibutuhkan strategi, baik dari Komisi X DPR RI maupun Pemerintah, agar pembahasan tidak menemui kendala.

**H**al tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Panja RUU tentang Kebudayaan dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11). Dalam rapat ini juga dibahas beberapa substansi yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

## Lukman Edy Terpilih Menjadi Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

Politisi dari Fraksi PKB Lukman Edy terpilih dan disahkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat perdana Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/11) malam.

“ Dari perolehan suara pansus, tergambar bahwa fraksi yang akan duduk sebagai Pimpinan Pansus RUU Pemilu yaitu paket Ketua dari F-PKB, Wakil Ketua dari F-Gerindra, Demokrat, dan PAN dengan perolehan 15 suara,” ungkap Fadli Zon saat membacakan hasil musyawarah mufakat dan lobi antar fraksi.

Pemilihan pimpinan Pansus berlangsung alot dan sempat diwarnai perbedaan pendapat terkait mekanisme perhitungan paket pimpinan. Dalam rapat yang dimulai pukul 21.30 WIB itu, terpilih paket pimpinan dengan komposisi Ketua Pansus Lukman Edy (F-PKB), sementara tiga wakil terpilih yaitu Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), Benny K Harman (F-Demokrat) dan Yandri Susanto (F-PAN).

Politisi dari F-Gerindra itu menambahkan, Pansus RUU ini cukup



Pimpinan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

penting karena melalui mereka akan melahirkan undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan gabungan dari tiga RUU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, Ketua Pansus terpilih Lukman Edy optimis pansus dapat bekerja secara maraton dan intensif, meskipun waktu pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu sangat terbatas.

"Semua peraturan dan perundangan tentang kepemiluan ini harus selesai 22 bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu di tahun 2019. Berdasarkan *konstrain* waktu seperti itulah, pansus akan menyusun jadwal pembahasan," terang Lukman.

Adapun, lanjut politisi F-PKB itu, mengatakan poin-poin yang akan direvisi dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut meliputi sistem terbuka-terbatas, waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif, wacana pengembangan daerah pemilihan, dan syarat usia minimal menjadi anggota KPU yang ditingkatkan menjadi 10 tahun, yakni dari 35 tahun menjadi 45 tahun. ■

akan dibahas dalam RUU Kebudayaan.

"Strateginya adalah pembahasan itu kita coba rinci secara sistematis apa yang perlu kita sepakati dulu, dari sistematis kemudian mengisi substansi-substansi yang ada di sistematis. Bisa diibaratkan sampai cicitnya substansi tersebut," ujar Ferdiansyah.

Politisi F-PG itu menambahkan, strategi disepakati sebagai solusi agar tidak terjadi *deadlock* berkepanjangan, karena RUU tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR RI sebagai ketahanan kebudayaan Indonesia.

"Kita sudah mencoba dengan maksimal pembahasan ini dengan cara membahas satu per satu Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM), tapi ternyata dalam pembahasannya terjadi *deadlock*," imbuh Ferdi.

Namun, masih kata Ferdi, karena dari awal muncul kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah bahwa RUU ini harus diselesaikan pembahasannya, maka diambil keputusan bersama agar substansi RUU ini tidak terlalu rinci.

"Kami sepakat untuk membahas strategi lain, yaitu dengan memutuskan bahwa Undang-Undang ini tidak perlu terlalu rinci karena nanti yang merinci adalah Undang-Undang lainnya," ungkap politisi asal dapil Jawa Barat XI tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Reni

Marlinawati (F-PPP) berharap dalam pembahasan RUU ini, agar dapat ditemukan bagaimana cara mengelola UU ini nantinya menghasilkan manfaat bagi bangsa. Mengingat, kebudayaan menjadi satu ketahanan nasional dan pemersatu bangsa.

"Indonesia ini dilimpahi oleh beragam budaya yang seharusnya menjadi pemersatu. Tapi disisi lain kita harus tahu bagaimana cara untuk melindungi dan mengembangkan sehingga dapat bermanfaat secara nilai, ilmu pengetahuan, hingga secara *benefit*. Oleh karena itu kebudayaan ini harus menjadi satu ketahanan nasional," tegas politisi asal dapil Jabar itu. ■

## RDP Komisi VI dengan KPPU Sepakati Beberapa Poin

Komisi VI DPR RI selenggarakan rapat dengar pendapat bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana, kedua belah pihak menyepakati beberapa poin diantaranya, tentang anggaran lembaga, apresiasi kinerja dan dukungan langkah KPPU.

**A**dapun realisasi anggaran KPPU yang disepakati oleh Komisi VI adalah sebesar Rp100.386.869.459,- atau 84,75 persen dari alokasi anggaran Rp118.455.216.000,- "Komisi VI DPR RI dapat memahami realisasi anggaran KPPU tahun 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016," ujar Azam di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senin (21/11).

Komisi VI juga memberikan apresiasi kepada KPPU yang telah patuh terhadap aturan perundang-undangan sesuai dengan surat Pimpinan

BPK. KPPU dinilai telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pelaksanaan anggaran KPPU tahun 2015



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana

mengenai sistem pengendalian intern. Komisi VI juga memberikan dukungan kepada KPPU dalam hal pelaksanaan Daftar Periksa Persaingan Usaha (*Competition Checklist*). Program ini sebagai upaya dorongan terciptanya iklim regulasi yang kondusif dalam meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf berkomitmen pada upaya perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya iklim regulasi yang kondusif. "Kami akan selalu mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional," tandasnya. ■

(eko), foto: rmi/br

## Cegah Praktek Korupsi, Irtama Gelar Sosialisasi LHKASN

Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) guna memberikan pengarahan terkait cara menyampaikan LHKASN melalui format aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN-RB melalui situs <https://siharka.menpan.go.id> pada Selasa, (22/11) di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

**D**alam sosialisasi tersebut, hadir Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama Kementerian PAN-RB, Kamaruddin dan Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran, Kementerian PAN RB, Harry Sukamto.

Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin menjelaskan bahwa korupsi adalah hal yang luar biasa dan perlu diperangi. Salah satu upaya memerangi korupsi adalah dengan rutin mengisi LHKASN guna memantau setiap



Pejabat Kemen PAN-RB rapat dengan Irtama DPR RI

kekayaan dari masing-masing ASN.

"Korupsi salah satu kejahatan luar biasa, jadi harus diperangi. Karena

pengecahan telah dilakukan, salah satunya melalui pelaporan harta kekayaan, khususnya LHKASN," ujar Kamarudin.

Mengingat ASN digaji melalui APBN, sehingga dalam penggunaannya harus transparan dan diketahui masyarakat, jadi ASN harus menyampaikan laporan tiap tahunnya. "Kita ingin tunjukkan ke masyarakat bahwa kita yang dibayar dari APBN juga harus transparan pada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Harry Sukamto menjelaskan dalam proses pengisian LHKASN dilakukan secara *online* dan sangat sederhana sehingga tidak menyulitkan. "LHKASN ini diselenggarakan secara *online*. Pengisiannya sangat sederhana," ujar Harry.

Sebagaimana diketahui, seluruh pegawai/ASN dimulai dari pejabat eselon I, II, III, IV dan staf/fungsional wajib menyampaikan LHKASN kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI melalui Inspektorat Utama. Laporan tersebut paling lambat diserahkan pada tanggal 23 Desember 2016. ■

(hs), foto: anka/br

## Inas Nasrullah Akan Sinergikan BUMN Energi

Setelah resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir menyampaikan misi yang dia gagas, yaitu berkoordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan maupun Anggota Komisi VI, dia pun berencana akan mensinergikan BUMN energi, seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau Perusahaan Gas Negara (PGN).

“ Karena sebelumnya saya dari Komisi VII ya, sementara ini, bagaimana nantinya BUMN energi itu bisa bersinergi dengan baik,” ujar Inas di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR RI, Kamis (17/11).

Dia yang sebelumnya bertugas di Komisi VII, tentu konsen dengan permasalahan energi, maka tak heran Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini berkehendak mensinergikan BUMN Energi. Rencana yang ia canangkan tersebut, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Inas mengatakan, hubungan antara BUMN Energi saat ini kurang melakukan kerjasama dengan baik, bahkan cenderung



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto berjabat tangan dengan Inas Nasrullah

berseteru, masalah ini tentu berakibat pada produktifitas yang tidak maksimal. "Artinya baik Pertamina dan PLN tidak seperti sekarang. Kayanya mesra tapi

padahal saling bertolak belakang, kita tidak menginginkan seperti itu," keluhnya.

Inas juga menyinggung 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dia akan mengusulkan pembuatan Panitia Kerja menangani masalah ini. Dirinya menengarai ada klausul dalam *Memorandum of Understanding* atau MoU pembangunan proyek yang merugikan negara.

banyak merugikan negara. Akan diteliti klausul-klausul mana yang merugikan negara. Harus ditindak lanjuti, kalau memang harus ke KPK ya ke KPK," tandas Inas. ■

(Eko), foto: Rumi/br

## Legislator Terima Aspirasi DOB Apau Kayan

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan apresiasi terhadap pengajuan Daerah Otonom Baru (DOB) Apau Kayan. Akan tetapi disampaikannya bahwa terdapat banyak tahapan terkait DOB, diantara proses baru dapat dilaksanakan setelah peraturan terkait Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) selesai. Meski demikian, sambil menunggu, harus mempersiapkan beberapa hal yang dapat dipergunakan untuk membuat rekomendasi.

“ Kita harus berjuang bersama,” tegas politisi Partai Golkar ini saat menerima perwakilan DPRD Kalimantan Utara pada Jumat, (18/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Hetifah menjelaskan dirinya yang juga masuk dalam Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, dalam waktu dekat akan mengagendakan kunjungan untuk melihat langsung situasi. "Mohon kerjasama dan informasi lengkap, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi secara tepat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, daerah perbatasan adalah beranda terdepan untuk kedaulatan dan harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, daerah perbatasan mutlak untuk mendapatkan perhatian serius. Hal itu disampaikan rombongan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dan Tim Presidium Pemekaran Apau Kayan Malinau.

Rombongan berjumlah 22 orang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Martin Sablon. Ia menyampaikan usulan DOB untuk daerah terisolir yang



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudin

berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia ini. "Bicara tentang perbatasan, sama dengan bicara kedaulatan, kami dari DPRD sepenuhnya mendukung," ujar Martin.

Ketua Presidium, Iba Ala menjelaskan bahwa sejak dahulu kehidupan penduduknya sangat tergantung kepada negara tetangga, karena jarak dengan Kabupaten Malinau justru sangat jauh. "Hanya dapat terhubung dengan pesawat udara saja. Tidak ada akses jalan darat ke sana," jelasnya. ■

(Gij), Foto: Naefroj/br

## DPR RI Harapkan Pembangunan Bandara Tebelian Dipacu

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pembangunan Bandara Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk terus dipacu. Dengan penambahan landasan pacu (*runway*) hingga 2500 meter, diharapkan dapat digunakan untuk pendaratan jenis pesawat berukuran besar sehingga lalu lintas penerbangan dari dan ke Kabupaten Sintang menjadi lebih efektif.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus

“Paling tidak, bisa sehari sekali penerbangan langsung ke Jakarta. Ini juga sangat membantu masyarakat, karena letak kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujar Lasarus saat menerima audiensi DPRD Sintang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Selain mempersingkat jarak tempuh, tambah politisi dari F-PDIP itu, keberadaan Bandara Tebelian dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Termasuk mengurangi biaya logistik dan transportasi masyarakat Sintang.

“Bukan hanya untuk sekedar perpindahan barang dan orang, tetapi juga bisa memangkas biaya transportasi masyarakat Sintang yang ingin melakukan penerbangan ke tempat lain,” tambahnya.

Di sisi lain, Lasarus juga mendorong keseriusan Pemkab

Sintang dalam melakukan pembebasan lahan yang menjadi ranah pemerintah daerah. Pasalnya, pembebasan lahan baru terlaksana seluas 187 hektar. Padahal, dengan lahan seluas itu, tidak memungkinkan untuk menambah landasan pacu pesawat hingga sepanjang 2500 meter.

“Bupati menyampaikan akan menyiapkan lahan seluas 525 hektare. Harapan kami, pembahasan lahan tersebut segera diselesaikan, karena semakin lama nanti harganya semakin naik. Ini bisa menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari,” tandas politisi dari dapil Kalimantan Barat itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD

Kabupaten Sintang, Harjono Bejang mengatakan pihaknya mendorong pembebasan lahan segera diselesaikan, sehingga pembangunan bandara bisa diperluas.

Pembangunan bandara yang menggantikan Bandara Susilo ini ditargetkan rampung pada awal tahun depan, sehingga bisa diresmikan pada Februari 2017, bersamaan dengan 14 bandara lainnya. Saat ini, landasan pacu pesawat yang sudah terbangun sepanjang 1650 meter. Adapun, pembiayaan pembangunan bandara ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten. ■

(amsy) foto:andri/bf

## Komisi VIII Dorong BP3KB Kalbar Bentuk Forum Tingkatkan Empati SKPD

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Mustaqim mendorong BP3KB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kalimantan Barat untuk membentuk forum-forum yang bisa digunakan untuk meningkatkan rasa empati.

Dari penjelasan kepala BP3KB Kalimantan Barat disimpulkan ada tiga perkara yang selama ini dialami oleh badan tersebut. Pertama adalah infrastruktur, SDM (sumber daya manusia) dan masalah anggaran. Namun dari tiga masalah itu saya melihat yang terpenting dan harus segera dicari solusinya adalah masalah SDM.

“Disini saya melihat peran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kalimantan Barat masih sangat minim. Mereka masih merasa kalau permasalahan pemberdayaan

# DPR RI Berharap Program Destana Bentuk Masyarakat Tangguh Bencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menekankan, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) harus dapat membentuk masyarakat yang tangguh bencana, masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi.

Demikian dikatakannya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR ke *Escape Building* Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (17/11). Di tempat ini, tim berdialog dengan Pemerintah Kota beserta jajarannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat setempat mengenai Program Destana yang sedang berjalan di Banda Aceh ini.

"Masyarakat juga diharapkan mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Ditambah lagi dengan telah dibangunnya *Escape Building* ini pemerintah setempat dan masyarakat harus terlibat dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya," jelas politisi F-Gerindra itu.

Sodik menambahkan, pihaknya juga

perempuan dan perlindungan anak cukup ditangani oleh BP3KB saja. Padahal hal itu pun bisa dilakukan SKPD lainnya yang mayoritas laki-laki. Hal inilah yang membuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan belum berjalan secara maksimal, meskipun beberapa Peraturan Daerah tentang hal itu sudah dikeluarkan," papar Mustaqim.

Oleh karena itu, lanjut Politisi dari Fraksi PPP ini, pihaknya berharap agar BP3KB dapat mengadakan forum-forum yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasa empati terhadap permasalahan perempuan dan anak.

Dengan kata lain, mengubah *mindset* satker (satuan kerja) di lingkungan pemerintah provinsi sangat penting selain memberikan bimbingan ke masyarakat. Salah satunya adalah menanamkan bahwa sesungguhnya anak adalah investasi terbesar



*Tim Kunspek Komisi VIII kunjungi Escape Building Gampong Deah, Aceh*

mendukung upaya pemeliharaan dan pemanfaatan *Escape Building*. Menurutnya, bila diperlukan ada regulasi bagaimana pemanfaatan bangunan itu di luar bencana, "Misalnya tempat yang mempunyai pemandangan bagus dapat dijadikan daerah wisata atau tempat bermain anak-anak. Ini tampaknya perlu dipertimbangkan oleh

bangsa ini. Sedangkan perempuan merupakan mitra sejajar laki-laki dalam menunjang pembangunan bangsa.

Sementara untuk masalah infrastruktur, Ahmad Mustaqim menilai bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BP3KB sudah terbilang memadai. Seperti kantor BP3KB yang sudah tersedia dengan baik, penampungan anak bermasalah dengan hukum juga sudah tersedia.

Sementara dalam hal anggaran, pihaknya memaklumi anggaran yang dimiliki BP3KB sangat minim, karena selama ini masih menggunakan APBD. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sebagai

daerah-daerah yang mempunyai *Escape Building*," ujar politisi dari Dapil Jabar I itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah setempat dan pusat agar mengatur pendanaan program penanggulangan bencana.

"BPBD sudah ada di tingkat kota, cuma memang tidak ada tekanan dari pusat bahwa setiap kali pengesahan APBD minimal 1 persen untuk penanggulangan bencana, karena tidak realistis

semua mengandalkan dari pusat," tegas politisi PKS itu. Dengan adanya dana dari APBD sekitar 1 persen atau setara kurang lebih 100 juta pertahun, tambah anggota DPR RI dapil Jabar itu, diharapkan program penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik lagi, dengan keterlibatan pemerintah kota lebih intensif pula. ■



*Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Mustaqim*

kementerian yang bersifat koordinatif memiliki anggaran yang sangat terbatas. Namun ia meyakini dengan digelarnya berbagai forum yang melibatkan SKPD Provinsi setempat dan masyarakat, maka apa yang menjadi tujuan dari badan tersebut dapat berjalan dengan baik. ■

(ram) foto: ray/br

(ayul) foto: Ayul/br

## DPR RI Targetkan Revisi UU ASN Selesai Sebelum Akhir Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“ Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan *draft* revisi terbatas UU ASN di DPR RI,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdikan bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak

pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdikan selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja

(Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. ■



Anggota Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka

## Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan Harus Ditindaklanjuti Pemerintah

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan lebih dari 70 persen sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi standar operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini yang mendorong Komisi X DPR RI membentuk Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala Dinas Pendidikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

“RDP ini adalah konfirmasi dari Dapodik bahwa dari 1,8 juta ruang kelas hanya sekitar 466 ribu saja yang baik dan 1,3 jutanya dalam keadaan rusak. Itu artinya hanya sekitar 30

persen sarana prasarana pendidikan yang layak,” tegas Fikri.

Politisi F-PKS itu menekankan, problematika tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, pihaknya mengundang perwakilan Kepala Dinas Kabupaten dan Kota untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerah setempat. Namun hanya dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tangerang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Sesungguhnya kita juga mengundang perwakilan baik bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, maupun Indonesia Timur, tapi tidak datang semuanya sehingga perlu dilakukan pertemuan selanjutnya,” imbuh Fikri.

Politisi asal dapil Jateng itu menjelaskan, permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik guru dan

tenaga kependidikan juga menjadi salah satu faktor problematika yang terjadi dalam sarana prasarana pendidikan.

"Karena guru sebagai elemen yang sangat vital dalam proses belajar mengajar. Tapi karena kondisinya sangat memprihatinkan maka sarana dan prasarana itu kita selesaikan satu-satu, dan panjangnya adalah tentang sarana prasarana pendidikan," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Luthfi Syam

berharap agar pemerintah pusat dapat menyelesaikan masalah tenaga kependidikan sehingga lebih fokus dalam penyelesaian sarana prasarana pendidikan. "Apa yang tadi kami sampaikan andai kata pemerintah pusat mau menyelesaikan persoalan tenaga kependidikan, kami yakin daerah akan banyak diringankan sehingga bisa lebih fokus mengurus sarpras," ungkapnya. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri

## DPR RI Bertanggungjawab Emban Amanat Rakyat

DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Antara Kepercayaan dan Harapan Publik" yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR RI harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. "Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR RI," ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu cara untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR RI. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR RI dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. "Yang terpenting adalah amanat masyarakat,



Kepala BKD Johnson Rajagukguk dalam acara seminar Nasional

aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri," tandasnya.

Ia pun mendorong semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR RI dari dalam sehingga keterwakilan DPR RI di publik semakin meningkat.

"Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR RI diharapkan semakin tinggi. Maka

tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR RI berkurang dari waktu ke waktu," imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo. ■

## Komisi IX Pertanyakan Data Peserta PBI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan keheranannya terhadap data warga miskin peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPJS punya data yang berbeda.

“ Saya tidak mengerti bagaimana sistem pendataan peserta BPJS. Kok bisa tiga institusi berbeda datanya. Kenapa pendataan tidak di satu instansi saja biar datanya tidak mubazir,” kata Saleh dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes, Mensos dan Kepala BPJS, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (21/11).

Akibat perbedaan data tersebut, lanjutnya, banyak kartu BPJS yang diretur. Sementara banyak masyarakat miskin tidak merasakan layanan kesehatan gratis karena tidak punya kartu BPJS.

“Yang seperti ini kan sangat merugikan rakyat. Cetak kartu tapi tidak jelas penerimanya. Kuncinya ada diverifikasi validasi data, pemerintah harus benahi ini,” tegasnya.

Sebelumnya dijelaskan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, jumlah orang miskin yang masuk ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2016 sebanyak 96 persen (92,4 juta jiwa).

Data tersebut mengalami perubahan dari data terakhir sebanyak 96,4 juta jiwa. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan f l u k t u a t i f perubahan yang

dilihat dari jumlah bayi yang lahir, perpindahan alamat, dan orang yang meninggal.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, permasalahan utama dalam pengumpulan data PBI dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialami Kemensos dan BPJS Kesehatan.

“Kami menemukan perbedaan master file (pengumpulan data) antara Kemensos dan BPJS Kesehatan. Perbedaan terletak dari data wilayah yang terjadi pada 400 kecamatan di seluruh Indonesia, terutama soal pemekaran kabupaten/kota diikuti pemekaran kecamatan,” katanya.

Khofifah menambahkan, jumlah orang miskin juga mengalami kendala saat pendataan verifikasi dan validasi data PBI. Jumlah orang miskin banyak yang tidak teregistrasi. “Data PBI yang harus diverifikasi jadi tidak bisa karena banyak *homeless* dan anak jalanan sudah berpindah tempat tinggal,” jelasnya.

Akibat berpindah tempat tinggal inilah, jumlah penerima kartu dari Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak sampai. ■



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

(rnm), Foto: Jayadi/br

## Dewan Minta Penjelasan Perubahan Opini Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Komisi VII DPR RI meminta penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Pertama Tahun 2015 BPK RI pada Kementerian ESDM yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11)

“Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, bahwa salah satu penyebabnya adalah pengendalian intran atas piutang PNBPN di Kementerian ESDM RI tidak memadai, sehingga terdapat kekurangan dan kelebihan penyediaan pada neraca, serta hasil konfirmasi atas intran tidak dapat dipakai untuk meyakini kewajaran nilai piutang,” kata Gus Irawan.

Selain itu sambung politisi Gerindra ini, ada kelebihan pembayaran atas proyek LPG mini plan Rp11,49 milyar di Kementerian ESDM, dan terdapat kekurangan PNBPN SDA dari wajib bayar pemegang IUP dan PKP2B atas iuran tetap tahun 2013 dan 2014 senilai Rp339,90 milyar.

“Ini memang dari sisi jumlah tidak terlalu material, tapi kemudian ini berkontribusi bagi menurunnya opini atas laporan keuangan Kementerian ESDM dari WTP menjadi WDP”, jelasnya.

## BKD Terima Masukan IPC Terkait RUU Migas

Badan Keahlian DPR RI (BKD) menerima koalisi masyarakat sipil guna mendapat masukan terkait pembahasan RUU Migas yang kini masih menjadi pembahasan Komisi VII pada Rabu, (23/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan, akan terus menerima masukan masyarakat dalam proses pembahasan RUU di DPR RI, salah satunya dari Indonesian Parliamentary Center (IPC). Hal ini sebagai wujud DPR RI dalam menyediakan ruang partisipasi bagi publik. "Ini bentuk partisipasi dari masyarakat dan harus diapresiasi. Untuk mendapatkan masukan kami juga melakukan kunjungan ke daerah," ujarnya.

Johnson pun mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan IPC terhadap BKD, sehingga diharapkan UU yang dihasilkan mampu memenuhi harapan masyarakat. "Ada beberapa hal yang disampaikan dan mereka sudah memiliki konsepsi. Kita hargai sepanjang masih memungkinkan diakomodasi akan kita akomodasi," katanya.

Ia pun menjelaskan mengenai rentang waktu yang cukup lama terkait pembahasan RUU Migas ini karena didalamnya

Selanjutnya ia juga menjelaskan, bahwa ada masalah lain yang menjadi temuan adalah Menteri ESDM RI menetapkan harga jual eceran untuk JBT dan harga eceran untuk jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2015 tanpa menetapkan harga dasar. Hal ini mengakibatkan Badan Usaha Penyalur menanggung kerugian dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP jenis bensin dan ron 88.

"Selain itu pemerintah atau Kementerian Keuangan RI juga tidak dapat melakukan perhitungan selisih subsidi yang harus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha," ungkapnya.

Dalam rapat kerja yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar



Kepala BKD Johnson Rajagukguk menerima koalisi masyarakat sipil

menyangkut hal fundamental sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang guna mengakomodasi segala masukan. "Proses pembahasan UU itu bisa makan waktu lama. Karena memang ada hal yang sangat fundamental yang harus dibicarakan dan didiskusikan," tuturnya.

Selain itu, ia pun berharap RUU Migas dapat disahkan pada tahun 2016 ini. "Kita berharap tahun ini bisa diselesaikan. Sejak penyusunan kita mencoba melibatkan publik secara luas. Mudah-mudahan nanti prosesnya bisa selesai di Komisi VII," jelas Johnson.

tersebut, Komisi VII DPR RI meminta penjelasan tentang komitmen pemerintah atas *Roadmap* Energi Baru dan Terbarukan, yaitu bagaimana mencapai energi *mix* di tahun-tahun ke depan. Dimana peran Energi Baru dan Terbarukan dari sebelumnya yaitu tahun 2010 perannya hanya 5% menjadi 23% pada tahun 2025. Dan berangsur menggantikan peran minyak yang pada tahun 2010 mencapai 49%, nanti pada tahun 2025 tinggal 25%.

"*Roadmap* Energi Baru dan Terbarukan sangat penting sebagai bagian dari upaya penyiapan sumber daya energi untuk menjamin infrastruktur energi nasional yang dapat menjadi tulang punggung industri, agar percepatan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan," tukas Gus Irawan. ■

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Inosentius Samsul dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan secara tertulis. Ia pun juga akan mendiskusikan dan meneruskan masukan

tersebut kepada Komisi VII DPR RI. "Terima kasih atas masukannya, kita selalu terbuka. Bahan ini akan kita diskusikan," jelas Inosentius.

IPC dalam hal ini telah menyampaikan 11 usulan materi pengaturan RUU Migas yang menyangkut perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN pengelola, dana minyak dan gas bumi, *domestic market obligation* (DMO), dana cadangan, *cost recovery*, *participating interest*, perlindungan atas dampak kegiatan migas dan sistem informasi dan partisipasi. ■



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

## Pengajian PIA DPR RI Angkat Peran Ibu

Ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI menjadikan Al Quran dan ibu sebagai tema pengajian bulanan kali ini.

“ Tema pengajian kita kali ini Al Quran dan Ibu. Al Quran merupakan panduan dan petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk panduan bagaimana menjalankan peran sebagai seorang ibu dan isteri. Dengan pendidikan yang baik dari seorang ibu akan muncul anak-anak yang berkualitas. Dan anak-anak itulah yang kemudian akan membangun bangsa ke depannya. Saya lebih suka menyebut bahwa ibu sebagai kontributor perkembangan peradaban bangsa. Ibu baik maka bangsa juga akan baik,” papar Wirianingsih, ustadzah yang juga pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014.

Lebih lanjut Wiwi, begitu Wirianingsih biasa disapa, mengapresiasi terselenggaranya pengajian PIA DPR RI secara rutin. Hal itu sangat baik selain untuk memperkuat tali silaturahmi, juga sebagai ajang saling berbagi ilmu, termasuk pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia), para isteri anggota DPR RI. Dimana ketika sang suami bertugas memikirkan negara, maka sang isteri mendukung tugas suami lewat pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu pihaknya sangat mengapresiasi.

Sementara itu Ketua Panitia Pengajian bulanan PIA DPR RI kali ini, Julie S Laiskodat mengatakan bahwa meski

dirinya merupakan non muslim, namun sebagaimana yang sudah disepakati bersama bahwa Fraksi Nasdem menjadi panitia penyelenggara kegiatan PIA di bulan November, maka sebagai ketua PIA Fraksi Nasdem, Julie merasa ikut bertanggung jawab agar pengajian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Suasana Pengajian rutin PIA

“Walaupun saya non muslim, namun karena memang sudah menjadi kesepakatan bahwa panitia pengajian PIA kali ini dipercayakan oleh Fraksi Nasdem, maka saya sebagai ketua PIA Fraksi Nasdem ikut bertanggung jawab acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Julie, Ketua Panitia Pengajian PIA ketika ditemui Parlemen usai pengajian di Masjid Baiturahman, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (22/11).

Wakil Ketua umum PIA DPR RI, Grace Fadli Zon mengapresiasi

terselenggaranya pengajian bulanan kali ini, termasuk keterlibatan Ketua PIA Fraksi Nasdem sebagai panitia pengajian tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk konkret dari sebuah tanggung jawab anggota PIA terhadap organisasinya. Meski demikian ia juga mengapresiasi bahwa anggota PIA tetap kompak dan saling support meski berbeda keyakinan. Ini merupakan salah satu bentuk dari toleransi yang ada di PIA DPR RI.

“Ini kan pengajian rutin PIA DPR RI yang digelar setiap bulan. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga mengajak ibu-ibu untuk belajar agama dan menambah ilmu. Kebetulan panitia pelaksana pengajian kali ini dari Nasdem dan ketuanya bu Julie. Jadi meski bu Julie non muslim namun sebagai Ketua PIA Nasdem beliau tetap ikut terlibat sebagai panitia.

Yang kedua itu juga sebagai sebuah bentuk bahwa PIA DPR RI tetap kompak dan saling support meski berbeda keyakinan. Disinilah terlihat toleransi di antara anggota PIA DPR RI sendiri,” pungkas Grace.

Grace menambahkan bahwa toleransi antar umat beragama di Indonesia sejatinya sudah ada sejak lama, dan tetap terjaga hingga kini. Jadi pihaknya merasa yakin bahwa Bhineka Tunggal Ika tetap ada di dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi. ■

(ayu/foto:rizidar/br)

## Komisi IX Tanyakan PHK di PT Freeport dan PT Redpath

Komisi IX DPR RI mempertanyakan pekerja PT Freeport dan PT Redpath yang diberhentikan (PHK) serta disebarkan nama-nama yang diberhentikan melalui email ke 96 perusahaan kontraktor yang ada di Papua agar mereka tidak diterima bekerja.

Hal ini mengemuka pada rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Papua beserta perwakilan Serikat Pekerja dari PT Freeport dan PT Redpath, Selasa (22/11) di gedung DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan semua pihak terkait termasuk memanggil

ulang pihak perusahaan PT Freeport dan PT Redpath untuk dimintai keterangan.

“Kita panggil Kementerian Tenaga Kerja beserta Direktorat Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial,

(ayu/foto: Ayu/br)



Pimpinan Komisi IX DPR RI

karena mereka yang berwenang dalam hal ini. Selain itu, kita juga akan panggil kembali PT Freeport dan PT Redpath untuk menanyakan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, karena kami belum mendapatkan laporan resmi, kami harus mendengar kedua belah pihak," ujarnya usai memimpin rapat.

Politisi Fraksi PAN itu juga menegaskan pihaknya akan terus mempelajari kasus ini dan melihat kepada undang-undang apakah ada peraturan yang dilanggar.

Senada dengan Saleh, Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Angraini mengatakan masalah ini seharusnya tugas dan kewenangan Kemenaker, apabila di level provinsi tidak dapat diselesaikan. Apalagi, perselisihan hubungan industrial sudah memakan waktu hingga 2 tahun dan merugikan banyak pihak.

"Harusnya yang melakukan ini Kemenaker, tapi kami bisa mediasi karena ini menyangkut nasib 125 pekerja yang diperlakukan semena-mena, ini juga fungsi kami untuk melindungi para pekerja. Kami akan memanggil kembali PT Freeport dan PT Redpath untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Sebelumnya, perwakilan Serikat Pekerja Papua Yasaya menjelaskan, PHK yang dilakukan terhadap 125 pekerja tidak sesuai dengan prosedur. "Kami sudah menempuh semua jalan untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak didengar oleh pihak perusahaan, makanya kami pikir jalan terakhir mengadu ke DPR RI," ungkapnya.

Pihaknya berharap pertemuan dengan DPR RI memberikan solusi yang tepat. "Masalah tersebut merupakan persoalan besar. PHK ini menambah tingkat kemiskinan di Papua, karena 125 pekerja yang di PHK belum mendapat pekerjaan karena email yang dikirim orang asing ke 96 perusahaan kontraktor agar tidak menerima mereka bekerja, bahkan ada 4 orang yang meninggal dunia," tuturnya.

"DPRD Papua juga sudah membentuk Panitia Khusus untuk kasus tersebut agar tidak ada lagi yang berteriak tidak puas dengan negeri ini. DPRD bahkan telah membentuk Pansus untuk mengawal dan memberi advokasi terhadap kasus tersebut," tambahnya. ■

(rmi)/foto:rikuabdi

## Komisi VIII DPR RI Dukung NTB Jadi Daerah Percontohan Sistem Sertifikasi Halal

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa dijadikan daerah percontohan penerapan sistem sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“ NTB bisa menjadi sebuah *role model* penerapan sistem sertifikasi halal. Ini bisa di seriuskan dan diimplementasikan tentunya dengan adanya dukungan tadi aturan daerah yang sudah ada. Nah saya menjadi sangat setuju kalau ini bisa menjadi salah satu tempat kita menjadi *test* untuk skala nasional,” ujar Achmad saat Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan Wagub NTB Muhammad Amin beserta jajaran, MUI NTB, di Mataram, NTB, Selasa (22/11).



Anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim

Menurut politisi PPP itu, dari sisi regulasi sistem sertifikasi halal sudah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Namun masalahnya, belum ada peraturan di tingkat operasionalnya. Biasanya, kecenderungan sebuah UU itu tingkat agresivitasnya ada di wilayah peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Perpres, PP, ataupun Permen.

"Misalnya UMKM atau swasta, semua pelaku usaha itu secara prinsip sudah ada undang-undangnya yaitu UU No.1 tahun 1987, tapi secara operasional itu belum bisa. Akibatnya organisasi-organisasi pengusaha swasta yang tidak mempunyai landasan, otomatis menjadi kurang kuat, inilah yang saya cermati soal UU Jaminan Produk Halal itu," katanya.

Meski begitu, politisi asal dapil Jateng itu menilai perlunya meeting bilateral sehingga menemukan titik temu dengan daerah lain yang berdekatan. "Mohon maaf NTB kan diapit oleh NTT yang mayoritas non muslim, kemudian di sisi sebelahnya ada Bali juga mayoritas non muslim, artinya sumbu terkait dengan sertifikasi halal kalau aspeknya pariwisata itu tidak bisa lepas dari NTT dan Bali, oleh karena itu harusnya ada sebuah *meeting bilateral* sehingga menemukan titik *link*-nya," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap, agar pemerintah pusat segera menyusun peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri agar UU tersebut dapat dijalankan efektif.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Lombok, NTB ini dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah Amaliah (F-PKS), dan diikuti sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI diantaranya Muhammad Lutfi (F-PG), Zulfadhli (F-Gerindra), Anda (F-Gerindra), MHD Asli Chaidir (F-PAN), An'im F Mahrus (F-PKB), Wenny Haryanto (F-PG). ■

(nu). Foto: mia/br

## Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pemprov NTB Jalankan UU Jaminan Produk Halal

Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang sudah mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kendati pemerintah pusat belum menyelesaikan peraturan turunan untuk pelaksanaannya. Menurutnya, Pemprov NTB sudah dapat mengimplementasikan UU ini, karena kesiapan dari pemerintah daerah dan juga pelibatan masyarakat yang cukup baik.

“ Sehingga kalau kita bisa lihat prestasi dan penghargaan yang berkaitan dengan halal *tourism* ini merupakan suatu hal yang sungguh luar biasa. Ini sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah lain, tetapi Pemprov NTB sudah melakukannya terlebih dahulu,” kata Ledia kepada Parlemenaria usai Tim Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan dengan Wagub NTB Muhammad Amin beserta jajarannya, MUI NTB di Mataram, NTB, Selasa (22/11).

Menurut politisi F-PKS itu, dalam banyak kejadian, masih didapati peraturan turunan yang belum selesai. Bahkan, terkadang menjadi sulit diimplementasikan di lapangan, meski peraturan di atasnya sudah ditetapkan, dalam hal ini Undang-Undang.

“Nah, tapi usaha yang dilakukan ini sudah luar biasa, jadi dengan target yang cukup tinggi, kemudian juga hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian tinggal tahapan-tahapan berikutnya adalah dukungan dari pusat dalam berbagai hal,

utamanya adalah penyempurnaan regulasinya terlebih dahulu,” ujarnya.

Ledia menambahkan, juga perlu adanya sinkronisasi antara kementerian dan lembaga untuk merumuskan peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 itu, apalagi ada jarak yang cukup lama antara UU itu disahkan dengan peraturannya.

“Mereka (Pemerintah Pusat) harus melakukan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga. Ada sejumlah hal yang harus diselesaikan, dan juga memang ini dorongannya harus lebih berat,” katanya.

Misalnya saja, kata Ledia, Kementerian Agama harus segera menyelesaikan peraturan turunan dari UU Jaminan Produk Halal. “Supaya tidak susah melangkah, karena nanti ketika daerah melakukan sesuatu, tiba-tiba ini tidak ada aturannya, kan repot juga. Makanya ini harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Yang tak kalah penting dirinya pun meminta Pemprov NTB juga mendorong kesiapan sejumlah fasilitas pendukung di luar jaminan produk halal dalam mengembangkan pariwisata NTB.

Menurutnya, dari segi aksesibilitas, diperlukan penambahan penerbangan langsung dari kota-kota besar di Indonesia maupun luar negeri menuju Lombok.

“Setidaknya *direct flight* dari beberapa kota besar atau dari beberapa negara terdekat yang memudahkan bagi mereka (turis, RED) langsung, karena memang agak sukar ya, karena Lombok kan agak di pinggir,” ujarnya.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, sebagai daerah berjudul Pulau Seribu Masjid, sudah sepatutnya NTB lebih mendorong untuk kemajuan pariwisata halalnya.

Dalam hal ini, masih

kata Ledia, Pemprov NTB bisa mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa ikut aktif dalam mendorong kemajuan pariwisata halal NTB. “Yang sederhana saja sudah dilakukan Thailand seperti kuliner dan oleh-oleh halal,” ungkapnya.

Sementara itu dalam pertemuan, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin menerangkan bahwa Pemda NTB telah mengeluarkan kebijakan terkait sertifikasi halal dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal. Pergub ini salah satunya mengatur kewajiban pelaku usaha wisata restoran hotel, restoran mandiri dan *catering* agar menjamin kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi konsumen dengan bersertifikasi halal.

Wagub NTB pun menyampaikan kendala terkait sertifikasi halal di NTB, yaitu masih rendahnya kesadaran pelaku usaha melengkapi sertifikasi halal usahanya, kurangnya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, belum optimalnya koordinasi antara SKPD terkait yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, terbatasnya jumlah auditor halal, dan belum adanya aturan turunan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berupa Perpres dalam menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi NTB ini diikuti sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI diantaranya, Muhammad Lutfi (F-PG), Zulfadhli (F-Gerindra), Anda (F-Gerindra), MHD Asli Chaidir (F-PAN), An'im F Mahrus (F-PKB), Achmad Mustaqim (F-PPP), Wenny Haryanto (F-PG). ■



Anggota Komisi VIII Ledia Hanifah Amaliah



*Tim Panja Pendis Komisi VIII DPR RI foto bersama Kanwil Kemenag Sulsel*

## Pendidikan Islam Sulsel Tinggi Tapi yang Dikelola Negara Minim

Semangat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi, namun yang dikelola negara jumlahnya sedikit. Dari jumlah 1.368 madrasah hanya sekitar 100 madrasah yang berstatus negeri atau hanya 8 persen.

**H**al itu ditegaskan Ketua Tim Panitia Panja Pendis Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis se usai memimpin pertemuan dengan Kanwil Kemenag Sulsel Wahid Thahir dan jajaran di Makassar, Selasa (22/11).

Kepada Tim Komisi VIII, pejabat Kemenag Sulsel menambahkan, pendidikan madrasah tidak dipungkiri keberadaannya dan berkontribusi dalam peningkatan SDM namun sebagian besar atau 92 persen dikelola swasta.

Melihat kondisi ini, Komisi VIII DPR RI berharap Menteri Agama turun tangan membantu masalah ini dengan cara menerbitkan madrasah swasta tersebut, sehingga kualitas pendidikannya akan terkontrol. "Kemenag diharapkan bisa membantu menerbitkan madrasah di semua tingkatan dari ibtidaiyah, tsanawiyah hingga aliyah," tutur Iskan.

Sedangkan yang tidak bersedia dinegerikan, dia berharap bisa ditingkatkan sertifikasinya misalkan yang berkategori C ke B atau dari B ke A. Di sisi lain, politisi PKS ini juga meminta Pemda bisa menganggarkan pendidikan Islam ini sebab tugas

mencerdaskan bangsa tidak hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga pemda.

"Jadi jangan ada anggapan Pemda tidak boleh menganggarkan untuk pendidikan Islam. Selama tidak dobel anggaran, bisa dialokasikan oleh Pemda," tegas anggota Dewan dari Dapil Sumut ini.

Tim Panja Pendis Komisi VIII juga menerima masukan soal akreditasi dimana dari 686 madrasah hanya 7% yang mendapatkan nilai A dan akreditasi B sebanyak 38%. Yang berkategori C termasuk tidak layak. "Kalau akreditasi diterapkan secara konsisten maka sekitar 60% madrasah di Sulsel bisa gulung tikar," jelasnya.

Iskan Qolba Lubis menanggapi hal itu berjanji akan meneruskan kepada Kemenag dan maksud Tim Panja Pendis ke Sulsel adalah untuk mendapatkan informasi dan kondisi faktual program Pendis termasuk tata kelolanya. Masukan dan data-data ini akan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran pendis yang tepat sasaran. ■

*(mp). Foto : mastar/br*

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



Suasana rapat Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon memilih pimpinan Pansus, Senin (22/11).  
Foto: jaka

Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri membahas persoalan E-KTP jelang Pilkada serentak 2017  
Rabu, (23/11) Foto : Jayadi



Rapat Panja RUU KUHP dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dengan Pemerintah  
Rabu, (23/11) Foto : Arief